

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritik dan Konseptual

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.

Menurut Chamber, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*people centered*", *participatory*, dan *suistanable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi social dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang

dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Jim Ife, 1997:63-64).

Pemberdayaan mengandung nilai-nilai instrinsik dan nilai-nilai instrumental. Pemberdayaan memiliki relevansi pada tataran individual dan kelembagaan serta bias berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial, maupun politik. Terdapat banyak definisi tentang pemberdayaan, Zubaedi (2007) menekankan definisi pemberdayaan pada level yang berbeda-beda baik pribadi, yang mencakup rasa percaya diri dan kemampuan seseorang, rasional, yang menekankan kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi hubungan dan keputusan; serta pada level kolektif. Selain itu, pemberdayaan dapat difokuskan pada tiga dimensi yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan pada kehidupan seseorang, yaitu : akses terhadap sumber daya, agen dan hasil. Amartya Sen mendefinisikan pemberdayaan dengan menekankan pentingnya kepentingan hakiki dan kebebasan individual dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda (Deepa Naraya et.all, 2002).

Menurut Jim Ife, pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Jim Ife, 1995:182). Menurut World Bank pemberdayaan adalah perluasan asset-aset dan kemampuan-kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, mempengaruhi, mengontrol serta mengendalikan tanggungjawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Deepa Naraya et. All, 2002).

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi kegiatan pembangunan yang termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik : 1) berbasis local; 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; 3) berbasis kemitraan; 4) bersifat holistic dan 5) berkelanjutan (Gunarto Latama, et.all, 2002:4).

Sedangkan menurut Ginanjar, Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

**Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

**Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi

masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*".

**Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan

subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

**Pertama**, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

**Kedua**, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

**Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental.

Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan

kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965).

Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendampingan dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut. Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri.

Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986). Kemajemukan atau *pluralisme* inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas masyarakat, mengakibatkan individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai

salah satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

## 2. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan Komunitas (*Community Empowerment Approach*) Menggunakan asumsi adanya ketidakberdayaan yang membelenggu masyarakat karena kooptasi negara dan pasar, pembangunan berbasis komunitas memasuki tahap perjalanan pembangunan yang penting di dekade 1990-an. Ada beberapa semangat atau prinsip penting yang mendasari aliran pembangunan kontemporer ini, yaitu: partisipasi, demokrasi, kesejahteraan, kolektivitas, dan pembangunan yang diinisiasi oleh “kekuatan dari dalam”. Ideologi pemberdayaan dengan sengaja ditonjolkan sebagai satu-satunya identitas filosofis pendekatan ini.

Pada perkembangannya, banyak upaya pengembangan komunitas (*community development*) yang mengambil strategi pemberdayaan sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan ini menganalogikan komunitas sebagaimana layaknya kesatuan “tubuh manusia” yang bisa mengalami perubahan, bergerak, berkembang, dan bahkan memiliki energi dan kekuatan dari dalam untuk berubah. Pemaknaan konsep komunitas dengan mengasosiasikannya ibarat tubuh manusia itu, diinspirasi oleh pandangan yang menganggap komunitas sebagai sebuah lapangan sosial (*social field*). Menurut Wikinson (1972), sebagai sebuah lapangan sosial, komunitas bersama-sama dengan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, seperti kelompok sosial (*social group*) dan organisasi, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Ada proses atau **interaksi sosial** yang berlangsung secara kontinu di dalamnya. Dinamika interaksi sosial ini menandakan bahwa ada kehidupan yang berarti dalam sistem komunitas itu.
- b. Ada arah **perubahan ke suatu titik tertentu** (*there is a direction toward some more or less distinctive outcome*). Artinya, komunitas tidak statis berada di satu titik dan tak pernah beranjak untuk berubah.
- c. Ada **perubahan atau perkembangan** yang berlangsung secara teratur atas elemen dan struktur pembentuknya.

Sebagai turunan sebuah “lapangan sosial”, Wilkinson (1972) memandang komunitas dipandang sebuah lapangan komunitas (*community field*), yang dipahaminya sebagai:

*“a locality oriented social field which actions expressing a broad range of local interests are coordinated and organized”*

Artinya, sebagai lapangan sosial, komunitas tidak sekedar dipahami sebagaimana maknanya secara harfiah. Namun, komunitas telah pula menjadi sebuah arena atau ajang dimana pengaruh serta kekuatan-kekuatan lokal bekerja secara teratur dan terkoordinasi, dimana akhirnya menghasilkan perubahan-perubahan (*community change*). Dengan mengacu pada pemahaman karakter komunitas seperti di atas, maka bisa dimengerti bila konsep komunitas dipandang layaknya sebuah *organisme* yang “hidup” (*a systemic unity*) dan bisa dibentuk serta ditumbuh-kembangkan (Bell and Newby, 1978).

Dengan asumsi ini, dalam teori pembangunan muncul beberapa kajian tentang *community power*, yang menempatkan komunitas-komunitas pada suatu tempat dan memiliki kapasitas sehingga mampu melakukan aktivitas proses-proses sosial (seperti berinteraksi sesamanya, berkompetisi sesamanya, hingga berkonflik dengan komunitas lain). Apakah sebenarnya *community empowerment* itu? Dalam strategi pemberdayaan, “proses perekayasaan” ditekan seminimal mungkin terjadi. Wilkinson (1972) memaknai pemberdayaan adalah proses pembangunan yang lebih natural, dimana perumusan masalah dan pencarian solusi diserahkan pada komunitas. Dengan demikian **pemberdayaan komunitas** adalah:

“sebuah upaya perubahan (kemajuan) yang sengaja (*purposive*) dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri.... dimana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri....dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan (*improvement*)...sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan”

Kemudian pemahaman atas konsep pemberdayaan komunitas terus berkembang. Dengan mengutip pendapat Christenson dan Robinson (1980), Fear dan Schwarzweller (1985) memahami konsep ini sebagai “sebuah proses perubahan

yang inisiatifnya muncul dari anggota-anggota komunitas yang bersangkutan”. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pengembangan komunitas dapat dilihat pada gejala: “sekelompok orang yang bekerjasama secara bahu-membahu dalam sebuah *setting* komunitas (lokal) dimana mereka menegakkan prinsip musyawarah (*shared decision*) dalam merancang proses-proses perbaikan atau perubahan secara partisipatif .... di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan”. Dengan demikian, pembangunan mendapatkan pemahaman secara khusus, dimana makna dan konsep **partisipasi masyarakat lokal menjadi kata kunci** yang sangat penting. Fear and Schwarzweller (1985) mengemukakan bahwa **pemberdayaan komunitas** dipahami sebagai :

*“a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”*.

Dengan memperhatikan pemahaman tersebut, maka pemberdayaan komunitas dipahami secara khusus sebagai: “perubahan sosial yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota sebuah komunitas (*a locality-relevant planned change*)...yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi, dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip *resident participation* dijunjung tinggi”. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan (*empowerment*) dipahami dari berbagai sudut dan pengertian yang cukup beragam, namun mengerucut pada satu *focal point* yang jelas. Konsep pemberdayaan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives (Rappaport, 1984 dalam Weissberg, 1999).*
- b. *Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally “taking over power from somebody else” at the purely political level. This means, it includes*

*knowledge, education, organization, rights, and 'voice' as well as financial and material resources (Schneider, 1999).*

- c. *Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance (Osmani, 2000).*
- d. *Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening of individual's opportunities (Hacker, 1999).*

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, Dharmawan (2000) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai:

*"a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living"*

### **3. Pemberdayaan Pemuda**

#### **a. Usia Pemuda**

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan pemuda sebagai periode transisi antara anak-anak dan dewasa (*Youth generally refers to transition period from childhood to adulthood*). Ketentuan rentang usia pemuda disesuaikan pada situasi dan kondisi masing-masing negara. Namun, rentang usia yang direkomendasikan PBB adalah 15 sampai 24 tahun.

**Tabel 1. perbandingan rentang usia pemuda di berbagai negara di PBB**

<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>Usia Pemuda</b>
1.	Australia	15 – 25 Tahun
2.	Bangladesh	15 – 30 Tahun
3.	Brunei Darussalam	15 – 25 Tahun

4.	China	14 – 28Tahun
5.	India	13 – 35 Tahun
6.	Malaysia	15 – 40 Tahun
7.	Maldives	16 – 35 Tahun
8.	Mikronesia	6 – 35 Tahun
9.	New Zealand	15 – 24 Tahun
10.	Pakistan	15 – 29 Tahun
11.	Papua New Guinea	12 – 35 Tahun
12.	Philipina	15 – 30 Tahun
13.	Republik Korea	19 – 24 Tahun
14.	Samoa	15 – 35 Tahun
15.	Singapura	15 – 29 Tahun
16.	Srilangka	15 – 24 Tahun
17.	Thailand	12 – 25 Tahun
18.	Tonga	12 – 25 Tahun
19.	Vanuatu	15 – 24 Tahun
20.	Vietnam	15 – 35 Tahun
21.	<i>Comonwealth Youth Programe</i>	16 – 29 Tahun
22.	Perserikat Bangsa Bangsa	15 – 24 Tahun

*Sumber : Lampiran Naskah Akademik RUU Kepemudaan*

Indonesia belum memiliki batasan secara resmi karena belum adanya Undang-undang tentang kepemudaan, namun berdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan rentang usia pemuda di Indonesia adalah 18 sampai 35 tahun, disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

undang Perlindungan anak yang mengatur batas usia anak yakni 0 sampai 18 tahun.

#### **b. Kebijakan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**

Pemuda, merupakan Sumber Daya Manusia yang paling potensial ditinjau dari aspek produktivitas maupun aspek kuantitasnya. Partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional menjadi alah satu faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Partisipasi yang rendah dari pemuda akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Ada tiga kerangka kebijakan yang digulirkan untuk menggerakkan pembangunan di bidang kepemudaan, yaitu : pertama kebijakan perlindungan. Potensi setiap pemuda Indonesia harus dilindungi dari berbagai faktor destruktif, misalnya penyalahgunaan narkoba, pergaulan seks bebas, dan berbagai tindakan destruktif akibat berbagai pengaruh perubahan lingkungan domestik maupun global. Upaya perlindungan ditempuh dengan menumbuhkan imunitas pemuda terhadap berbagai pengaruh destruktif, dalam hal ini pendidikan berperan dominan dalam meningkatkan imunitas pemuda.

Kedua, Kebijakan Pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda adalah upaya transformatif untuk mengubah segenap potensi positif (minat dan bakat) yang dimiliki pemuda menjadi, ketrampilan dan kompetensi agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi, serta meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan dari aspek sosial juga perlu mendapatkan perhatian serius. Realitas sosial dan ekonomi dikalangan pemuda diperlukan kebijakan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan sentra pemberdayaan pemuda, peningkatan kegiatan ekonomi pemuda, pelatihan pemuda melalui pusat-pusat pendidikan dan pelatihan dan melalui pengembangan berbagai pelatihan yang memacu tingkat kreativitas di kalangan pemuda. Untuk meningkatkan upaya pemberdayaan pemuda secara sistematis dan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah harus membangun kerja sama yang sinergis untuk mewujudkan koherensi antara

kebijakan tingkat nasional dengan kebijakan tingkat daerah, sehingga jumlah pemuda yang mandiri secara sosial dan ekonomi semakin meningkat.

Ketiga, kebijakan pengembangan. Jika arah dari kebijakan pemberdayaan pemuda adalah melakukan upaya transformatif menuju pemuda yang mandiri secara sosial dan ekonomi, maka arah kebijakan pengembangan pemuda lebih menitikberatkan pada munculnya peran kepeloporan pemuda dalam dimensi kepemimpinan dan dimensi kewirausahaan. Kompleksnya permasalahan kemasyarakatan yang dialami bangsa Indonesia membutuhkan peran kepemimpinan pemuda untuk berpartisipasi dalam menyelesaikannya. Memunculkan wirausahawan baru merupakan kebijakan yang harus ditempuh dengan mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang memudahkan tumbuhnya wirausahawan muda. Saat ini jumlah wirausahawan muda sangat sedikit, jadi wajar jika tingkat pengangguran pemuda sangat tinggi.

Untuk melahirkan jumlah wirausahawan muda dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Maka harus dibangun sentra-sentra kewirausahaan pemuda. Melalui sentra ini, maka para pengusaha muda dapat bertemu dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang diharapkan dapat memberikan akselerasi bagi kemandirian usahanya. Para pemangku kepentingan itu adalah wirausahawan senior yang dapat menjadi mentor yang akan membimbingnya selama melalui tahap-tahap awal perintisan usaha dan bagaimana mengelola peluang usaha sebaik-baiknya (*business mentor*).

c. **Pemuda dan Anak Jalanan**

Banyak istilah yang ditunjukkan kepada anak jalanan seperti anak pasar, anak tukang semir, anak lampu merah, peminta-minta, anak gelandangan, anak pengamen dan sebagainya. Menurut Lusk (1989, 57-58), yang dimaksud anak jalanan adalah “...*any girl or boy...for whom the street (in the widest sense of the word, including unoccupied dwellings, wasteland, etc.) has become his or her habitual abode and/or source of livelihood; and who is inadequately protected, supervised, or directed by responsible adults.* [...] setiap anak perempuan atau laki-laki...yang memanfaatkan jalanan (dalam pandangan yang luas ditulis, meliputi tidak punya tempat tinggal, tinggal di

tanah kosong dan lain sebagainya) menjadi tempat tinggal sementara dan atau sumber kehidupan; dan tidak dilindungi, diawasi atau diatur oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.

Definisi anak jalanan yang disusun peserta lokakarya nasional anak jalanan DEPSOS bulan Oktober 1995, yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya". Usia anak jalanan berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun. Rentang usia ini dianggap rawan karena mereka belum mampu berdiri sendiri, labil mudah terpengaruh dan belum mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup. Di jalanan memang ada anak usia 5 tahun ke bawah, tetapi mereka biasanya dibawa orangtua atau disewakan untuk mengemis. Memasuki usia 6 tahun biasanya dilepas atau mengikuti temannya. Anak-anak yang berusia 18 sampai dengan 21 tahun dianggap sudah mampu bekerja atau mengontrak rumah sendiri bersama teman temannya. Anak jalanan dikelompokkan menjadi 3 tipologi yaitu anak yang mempunyai resiko tinggi (*children at high risk*), anak yang bekerja di jalan untuk membantu keluarganya (*children on the street*) dan anak yang hidup kesehariannya di jalan (*children of the street*). Ketiga tipologi anak jalanan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga model penanganannya juga berbeda.

Berdasarkan pengertian anak jalanan dan pemuda secara umum maka dapat disebutkan bahwa Pemuda Jalanan adalah pemuda yang berusia antara 18-35 tahun yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum dan tidak mempunyai pekerjaan secara tetap.

Seperti pada manusia umumnya pemuda jalanan juga mempunyai kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Menurut Abraham H Maslow, kebutuhan manusia itu mencakup kebutuhan fisik (udara, air, makanan), kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, kebutuhan untuk penghargaan dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan tumbuh.

Sebagian besar pemuda jalanan menghabiskan sebagian waktunya di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya adalah dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pokok tersebut dikarenakan ketiadaan ketrampilan untuk bekerja pada sektor formal. Realitas ini akan membawa berbagai persoalan dengan segala kompleksitasnya. Secara sosial, potensial mempengaruhi harmoni sosial. Dari sudut pandang ekonomi, sebagian mereka tidak terserap dalam lapangan kerja dan pengangguran.

#### 4. Pengertian Strategi

Kata strategi yang diserap dari kata *strategy* dalam bahasa Inggris secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratēgia-strategos* (jamak) yang berarti seni dalam melaksanakan perencanaan. Berdasarkan kamus *on line* merriam-webster, *strategy* didefinisikan sebagai *the art of devising or employing plans toward a goal* ([www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com)) – seni mengembangkan atau menerapkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Sementara dalam wikipedia, strategi didefinisikan sebagai berikut, “... *strategy is concerned with how different engagements are linked*” (wikipedia.org) – strategi difokuskan pada bagaimana berbagai aktivitas atau kegiatan dikaitkan.

Dalam seni perang strategi adalah perencanaan gerakan pasukan, kapal, dan sebagainya menuju posisi yang layak; rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebagainya. (*Oxford Pocket Dictionary*)

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Umar (2002:31) “strategi” didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Dalam perkembangannya, pengertian strategi terus mengalami perubahan dan pengembangan. Menurut Argyris (1985), Mintberg (1979), Steiner dan Miner (1977) dalam Rangkuti (2000:3) Strategi merupakan respon – secara terus menerus maupun adaptif – terhadap peluang dan tantangan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Strategi dapat dirumuskan sebagai berikut :

*“Memadukan tema pokok yang memberikan koherensi serta arah tindakan dan keputusan suatu organisasi”*

Keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik yaitu Penting, tidak mudah diganti dan melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu

## 5. Pengertian Model

Model adalah pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Departemen P & K, 1984 : 75). Definisi lain, model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase, yang sifatnya menyeluruh atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat kehidupan sebenarnya (Simarmata, 1983 : ix-xii).

Sebelum tahun 50-an pemakaian model di lingkungan manajemen, amat terbatas. Sesudah tahun 50-an pemakaian model untuk pembuatan kebijakan dan teknik pemecahan masalah berkembang pesat. Dengan berhasilnya jenis analisis ini untuk pemecahan masalah, maka hubungan yang sehat antara perencana dan pengambil keputusan tercipta. Mereka dapat mengembangkan kebijakan yang rasional. Pengembangan model bertujuan untuk menciptakan berbagai bentuk prototype implementasi yang dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Simarmata (1983; ix – xii) jenis – jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda, yaitu :

- a. Kelas I, pembagian menurut fungsi terdiri dari :
  - model deskriptif, hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan.
  - Model preditif : model ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi
  - Model normatif : model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberikan rekomendasi tindakan – tindakan yang perlu diambil.
- b. Kelas II, pembagian menurut struktur terdiri dari :

- Model mekanik : ialah model yang menirukan sistem aslinya, tapi dalam suatu skala tertentu. Contoh : model pesawat.
  - Model analog : ialah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog.  
Contoh : aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa.
  - Model simbolis, ialah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol – simbol, biasanya dengan simbol – simbol matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel – variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.
- c. Kelas III, referensi waktu terdiri dari :
- Statis : model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya
  - Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya
- d. Kelas IV, referensi kepastian terdiri dari :
- Deterministik ; dalam model ini, pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti.
  - Probabilistik : model probabilistik menyangkut distribusi probabilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan – kemungkinan dari harga – harga tersebut.
  - Game : teori permainan mengambarkan solusi – solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.
- e. Kelas V, tingkat generalitas yang terdiri dari umum dan khusus
- Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini termasuk model normatif yaitu model yang memberikan jawaban terbaik bagi suatu persoalan.

## 6. Pengertian karakter

Kata karakter berasal dari kata Yunani, *Charassein*, yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola (Ratna Megawangi, 2004:25). Jika mengacu pada arti diatas, maka pembentukan karakter dapat kita artikan dengan suatu proses pengukiran (melalui pengasuhan dan pendidikan) sehingga terbentuk suatu pola (perilaku tertentu) pada diri manusia.

Kepribadian atau (*personality*) berasal dari kata *person* yang salah satu artinya adalah Character (kekhususan karakter individu), yang dalam bahasa arab secara etimologis padanannya adalah *khuluqiyyah*, yang bentuk jamaknya adalah akhlak (Abdul Mujib, 2006:18-19). Menurut kamus Arab-Inggris, diartikan dengan *noral, character, temperament*.

Dalam wacana psikologi, kata akhlak memiliki ekuivalensi dengan karakter. Menurut Allport yang disitir oleh Sumadi Suryabrata, istilah karakter ini sama dengan kepribadian, namun dipandang dari sudut yang berlainan. Istilah karakter dipandang dari sudut "penilaian" (evaluasi) baik-buruk berdasarkan norma-norma yang dianut. Sedangkan kepribadian dipandang dari sudut "penggambaran" manusia apa adanya, tanpa disertai penilaian (devaluasi). (Sumadi Suryabrata: 2-3).

Menurut Busyairi (1997:86), karakter (watak) adalah keadaan atau konstitusi jiwa yang nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Karakter bergantung kepada pembawaan dan lingkungan hidup (pergaulan, pendidikan). Dengan demikian karakter bergantung kepada kekuatan dari dalam dan kekuatan dari luar.

Al-Ghazali seperti yang dikutip Abdul Mujib, berpendapat bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut dengan *khalq* (citra fisik), dan citra batiniah yang disebut dengan *Khuluq* (citra psikis). Dengan demikian *khuluq* didefinisikan oleh Al-Ghazali dengan "suatu kondisi (*hay'ah*) dalam jiwa (*nafs*) yang suci (rasikhah), dan dari kondisi itu tumbuh suatu aktifitas yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Pendapat Ibnu Maskawaih terkait dengan khuluq ini hampir sama dengan pendapat Al-Ghazali. Ibnu Maskaih mendefinisikan khuluq dengan "suatu kondisi (hal) jiwa (nafs) yang menyebabkan suatu aktifitas dengan tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu." (Abdul Mujib, 2006:26).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kata karakter sama dengan akhlaq, yang merupakan bentuk jama' dari *khuluq*, sedang kepribadian (*personality*) sama dengan syakhshiyah.
- b. Karakter, dipandang dari penilaian baik-buruk menurut tolak ukur norma-norma yang dianut (evaluasi), sedang kepribadian adalah penggambaran manusia apa adanya (devaluasi).
- c. Karakter digunakan untuk mengevaluasi kepribadian dari sudut baik-buruk, kuat-lemah, atau mulia-rendah. *Syakhsyah* tidak terkait dengan diterima atau tidaknya suatu tingkah laku, sebab didalamnya tidak ada unsur-unsur evaluasi.
- d. Dalam terminologi psikologi, karakter (*charakter*) adalah watak, perangai, sifat dasar yang khas, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Banyak Penelitian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan anak jalanan, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan pemuda jalanan masih sangat sedikit. Berikut akan dikompilasikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian.

1. **Pemberdayaan Komunitas (*Community Development*) di Pemukiman Kumuh Jakarta studi kasus pada pemukiman kumuh panas tanggul Jakarta (Tesis, Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia oleh Arifadi Budiarto tahun 2006).** Dalam penelitian ini terungkap bahwa pemberdayaan komunitas di Penastanggul dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu integrasi sosial, studi komunitas, pembentukan kelompok inti, pendidikan populer, pengorganisasian komunitas dan advokasi. Proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan mengkombinasi pendekatan *development of community* dan *development with community*. Model tersebut cenderung mendekati konsep pemberdayaan masyarakat dengan model aksi sosial meskipun pada beberapa aspek justru lebih dekat dengan model pengembangan masyarakat lokal.

Dari penelitian pengalaman proses pemberdayaan komunitas di pemukiman Penastanggul dapat di identifikasikan beberapa prinsip dalam pemberdayaan komunitas yaitu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, merupakan jalan mengembangkan kekuatan rakyat, rakyat merupakan pelaku, dan pihak luar hanya sebagai fasilitator, merupakan proses saling belajar. Selain itu terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pendamping komunitas adalah nilai-nilai keberpihakan pada komunitas, pendekatan holistik, pemberdayaan, HAM, kemandirian, berkelanjutan, partisipatif dan kesetaraan.

Secara umum pemberdayaan yang telah dilakukan di komunitas Penastanggul telah berhasil menacapai capaian yang sesuai dengan rencana awal. Namun demikian dari pengalaman tersebut ada beberapa hal yang dapat dikembangkan belajar dari pemberdayaan komunitas pemukiman kumuh di kamboja dan filipina antara lain membangun tabungan komunitas dan koperasi kelompok simpan pinjam, menghubungkan komunitas dengan komunitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, membangun jaringan dengan komunitas pemukiman-pemukinan kumuh lainnya sehingga upaya advokasi mendapat dukungan masyarakat secara lebih luas, melakukan survey pemukiman kumuh diseluruh kota untuk membangun kontak baru dan menindaklanjutinya dengan mengadakan sebuah seminar yang dihadiri oleh pemerintah, LSM dan dunia usaha, mengadakan pameran perumahan untuk menggali ide-ide warga mengenai bagaimana cara mendapatkan lahan, menmbangun komuniatas yang baik dan merancang rumah-rumah yang terjangkau bagi mereka sendiri dan menggunakan rencana-rencana tersebut untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan pihak lain, perlunya peningkatan sinergisitas antar aktor kunci lainnya yaitu pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga internasional dalam proses pemberdayaan komunitas.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek sarasannya yang meneliti pemberdayaan pada masyarakat di pemukiman kumuh. Persamaannya adalah pada objek penelitian yang memiliki permasalahan dalam bidang ekonomi.

2. **Program pemberdayaan anak jalanan melalui rumah singgah, studi kasus pada 5 anak jalanan di rumah singgah Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (Tesis, Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia oleh Ridha Haykal Amal tahun 2002).** Upaya penanganan anak jalanan, perlu melibatkan banyak pihak, profesi dan disiplin ilmu karena masalah anak jalanan merupakan hasil dan penghasil bagi masalah sosial lainnya. Rumah singgah anak jalanan YKAI merupakan salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak Indonesia, terutama anak-anak jalanan. Suatu bentuk usaha yang secara tidak langsung bertujuan melindungi anak-anak jalanan dari kondisi alam yang kadang kala tidak bersahabat, gangguan orang dewasa, dan melindungi mereka dari tingginya resiko kecelakaan melekat pada diri mereka.

Dilihat dari pendekatan yang digunakan, rumah singgah YKAI menggunakan pendekatan *centre based program* dengan fungsi intervensi rehabilitatif, yaitu berusaha melepaskan anak dari jalanan. Meskipun demikian rumah singgah juga menggunakan pendekatan *community based* dan *street based* yang tercermin dalam beberapa program dan kegiatannya. Rumah singgah adalah realisasi model penampungan *drop in centre* yaitu penampungan sementara, karena rumah singgah hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anak jalanan lepas dari jalanan agar kembali ke keluarga asli ataupun keluarga pengganti.

Rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara memberikan bermacam fasilitas sebagai daya tarik yang dapat digunakan oleh anak-anak jalanan untuk beristirahat, membersihkan diri, mencuci pakaian, makan, berteduh, tidur, bermain dan lain sebagainya. Selain fasilitas, anak-anak jalanan dirumah singgah juga memperoleh beragam pelayanan berupa program bimbingan anak, bimbingan keluarga dan pendidikan jalanan. Masing-masing dari program tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak jalanan. Program bimbingan anak diturunkan dalam bentuk kegiatan bimbingan sosial ke anak, bimbingan kesehatan, bimbingan agama, belajar

dan pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak jalanan yang masih bersekolah ataupun yang masih ingin melanjutkan sekolah. Program bimbingan keluarga terdiri dari kegiatan home visit, surat-menyurat dan mengundang orang tua anak jalanan untuk berdiskusi bersama tentang perkembangan anak mereka. Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan juga merupakan kegiatan dari program bimbingan keluarga. Sedangkan kegiatan yang tercakup dalam program pendidikan jalanan adalah kegiatan *outreach* yang di dalamnya sendiri terdiri dari bimbingan anak, keluarga, yang dilakukan oleh petugas *outreach* di jalan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada usia objek penelitian yaitu antara anak-anak dan pemuda dan terkonsentrasi pada rumah singgah sedangkan peneliti akan meneliti pemberdayaan pemuda jalanan secara umum. Persamaannya adalah objek yang diteliti sama-sama melakukan aktivitas di jalanan dan menimbulkan permasalahan sosial yang sama.

- 3. Anak Jalanan Sebagai elemen masyarakat Adab Jakarta, kajian terhadap anak jalanan sebagai subjek pemberdayaan di rumah singgah (Tesis, Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, Oleh Maman Supriatman tahun 2003).** Dari kajian yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa membangun masyarakat adab Jakarta merupakan suatu pembangunan aspek sosial dan budaya karena yang dibangun adalah pranata sosial yang berunsur sistem nilai dan norma yang diharapkan dapat membentuk pola perilaku dan hubungan sosial masyarakat.

Program pemberdayaan anak jalanan melalui rumah singgah merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan masyarakat adab di Jakarta melalui peningkatan ketrampilan, penanaman nilai dan norma di rumah singgah, diharapkan mampu mengentaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan. Dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di rumah singgah mereka diperkenalkan kembali dengan nilai-nilai dan norma sehingga setelah mereka kembali kepada keluarganya mereka dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar sebagai elemen masyarakat adab Jakarta. Namun demikian program pemberdayaan anak jalanan melalui rumah

singgah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan daya dan dana yang ada pada rumah singgah itu sendiri. Gambaran umum rumah singgah saat ini, masih sangat tergantung pada intitusi penyumbang dana, sementara disisi lain program rumah singgah sangat tidak produktif dan tidak dapat diandalkan secara finansial untuk mampu mencukupi kebutuhan operasional rumah singgah.

Interpretasi anak jalanan terhadap rumah tempat tinggal ternyata cukup beragam, sebagian menginterpretasikan rumah tempat tinggal sebagai tempat dimana dia tinggal serumah dengan orang tua dan keluarganya walaupun keadaan rumahnya tidak layak huni, namun apapun bentuk rumahnya mereka merasakan bahwa jalanan bukanlah rumah tinggalnya. Bagi mereka jalanan adalah tempat usaha atau mencari uang yang penuh resiko dan dapat membahayakan keselamatan mereka. Hasil interpretasi ini membawa konsekuensi terhadap makna rumah singgah sebagai rumah alternatif atau rumah kedua. Mereka menyukai tinggal atau berkunjung kerumah singgah karena mirip dengan kondisi rumahnya. Sementara itu sebagian mereka menginterpretasikan jalanan sebagai rumah tempat tinggalnya. Mereka lebih menyukai tinggal dijalanan bersama dengan teman-teman mereka, karena merasa mendapatkan perhatian dan perlindungan dari kelompoknya. Pada dasarnya mereka yang merasa lebih kerasan tinggal dijalanan dari pada dirumah adalah mereka yang bersal dari keluarga yang tidak utuh maupun yang mendapat perlakuan salah dari orang tua dan keluarganya.

Anak jalanan masih melihat rumah singgah sebagai lembaga pemerintah, sehingga diantara anak jalanan masih sungkan dan bahkan takut untulk berkunjung kerumah singgah. Rumah singgah diidentikan sebagai suatu wadah yang penuh dengan aturan yang akan mengikat anak jalanan, dan mengunjungi rumah singgah hanya membuang waktu saja. Konsekuensi dari anggapan ini adalah membuat anak jalanan merasa aman dan nyaman bersama dengan teman-teman dan kelompoknya, sehingga anak jalanan akan tetap kembali kepada sesamanya walupun mereka telah sering

berkunjung ke rumah singgah. Tapi di sisi lain juga terdapat anak jalanan yang mengatakan rumah singgah sebagai tempat yang bermanfaat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Mereka umumnya adalah anak jalanan yang masih terikat atau mempunyai keterkaitan dengan orang tua dan keluarganya, sehingga apa yang biasa diberikan keluarga untuk kebutuhannya maka kebutuhan tersebut diharapkan dapat diberikan dari rumah singgah. Pemenuhan kebutuhan anak jalanan yang diharapkan diberikan di rumah singgah dapat digolongkan kedalam dua jenis yaitu kebutuhan fisik dan non fisik.

Program rumah singgah yang disusun masih berdasarkan pada perspektif pemerintah dan belum pada perspektif anak jalanan sehingga seringkali maksud yang diharapkan oleh pemerintah berbeda dengan cita-cita atau pengharapan anak jalanan. Keberadaan rumah singgah selalu menjadi bahan perdebatan apakah masih relevan dengan upaya pemberdayaan anak jalanan ataukah harus diganti dengan pendekatan lain. Penyelenggaraan rumah singgah yang dilaksanakan oleh Yayasan atau organisasi sosialpun sering dianggap kurang memperhatikan aspirasi anak jalanan, sehingga terkesan mendirikan rumah singgah hanya untuk mendapatkan biaya dari pemerintah atau donatur, sementara anak jalanan hanya menjadi objek pemberdayaan dan bukan sebagai subjek.

Saat ini program rumah singgah masih perlu dipertahankan dan masih dapat diandalkan untuk menanggulangi anak jalanan. Yang perlu diperbaiki adalah mengoptimalkan peran rumah singgah melalui upaya membentuk kemandirian rumah singgah dapat melepaskan diri dari ketergantungan pihak-pihak penyandang dana rumah singgah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada usia objek penelitian yaitu antara anak-anak dan pemuda dan terkonsentrasi pada rumah singgah sedangkan peneliti akan meneliti pemberdayaan pemuda jalanan secara umum. Persamaannya adalah objek yang diteliti sama-sama melakukan aktivitas di jalanan dan menimbulkan permasalahan sosial yang sama.

4. **Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Untuk Orang Tua Dan Anak Jalanan Di Surabaya, studi kasus program pengembangan kewirausahaan dan program pengembangan minat dan bakat di Yayasan Arek Lintang Surabaya (Tesis, Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia oleh Mohammad Arif Khan tahun 2002 ).** Penelitian mengenai efektifitas program penanganan anak jalanan ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ada keterkaitan erat antara keberadaan anak di jalanan dengan situasi dan kondisi sosial keluarga anak jalanan tersebut. Faktor keluarga sangat menentukan dalam proses terjadinya anak jalanan.
- b. Program pemberdayaan ekonomi pada orang tua dan anak jalanan oleh Yayasan Alit masih dijalankan secara terpisah, bukan merupakan program yang terintegrasi dan saling mendukung
- c. Program pengembangan kewirausahaan tidak berhasil memenuhi targetnya
- d. Sosialisasi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan diskusi masalah kehidupan di jalanan mampu meningkatkan kesadaran orang tua mengenai bahaya dan resiko anaknya bekerja di jalanan.
- e. Program pengembangan minat dan bakat untuk anak jalanan menunjukkan hasil yang cukup efektif
- f. Dampak positif program pemberdayaan ekonomi orang tua adalah berkembangnya kesadaran orang tua mengenai hak-hak anaknya
- g. Dampak negatif program berupa ketergantungan terhadap pemberian bantuan materi dan berkembangnya jarak sosial antar keluarga di komunitas sasaran.
- h. Dampak positif dari program pengembangan minat dan bakat untuk anak-anak adalah berkurangnya aktifitas anak di jalanan, dan berupaya pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan yang bersifat produktif
- i. Dampak negatif program adalah semakin banyak anak jalanan yang berminat tinggal di shelter dan meninggalkan rumah orang tuanya
- j. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas program menyangkut faktor internal dan faktor eksternal, meliputi kualitas

sumber daya manusia, staf pendamping, ketersediaan fasilitas penunjang program, motivasi peserta program, dukungan keluarga, masyarakat serta mekanisme kontrol program.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek pemberdayaan yaitu pada keluarga dan fokus pada pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian yang akan dilakukan pemberdayaan pada seluruh aspek kehidupan pemuda jalanan, persamaannya adalah pemberdayaan ekonomi dimungkinkan dilakukan pada pemuda jalanan

5. **Penelitian Yang dilakukan oleh Hari Haryanto Setiawan tentang Mencegah Menjadi Anak Jalanan dan Mengembalikannya kepada Keluarga melalui model *Community Based* (Studi kasus anak-anak jalanan di Kampung Pedongkelan Jakarta Timur).** Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil observasi kondisi anak jalanan dan latar belakang keluarganya, maka model *community based* dianggap efektif dikembangkan di wilayah Kampung Pedongkelan.

Keberhasilan model *community based* tidak lepas dari peranan pendamping masyarakat yang dilakukan oleh pekerja sosial. Peran pekerja sosial dalam mendampingi masyarakat Kampung Pedongkelan antara lain: pertama, sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peranan sebagai *enabler* ini adalah peran klasik dari seorang *community worker*. Dasar filosofis dari peran ini adalah "*help people to help them selves*".

Kedua, sebagai *broker* (perantara) yaitu terkait erat dengan upaya hubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara, yang merupakan peran mediasi dalam konteks pengembangan masyarakat, juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubung ini.

Ketiga, pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Disamping itu ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Dalam kaitan dengan hal ini, seorang *community worker* tidak jarang harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi tersebut.

Keempat, sebagai tenaga ahli (*ekspert*), *community worker* diharapkan untuk memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Misalnya saja, seorang tenaga ahli diharapkan dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan dalam suatu organisasi nirlaba yang menangani lingkungan, kelompok-kelompok mana saja yang harus terwakili, atau memberikan masukan mengenai isu yang pantas dikembangkan dalam suatu komunitas (termasuk organisasi).

Kelima, sebagai Perencana Sosial (*Social Planer*) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan rasional untuk menangani masalah. Setelah itu perencana sosial mengembangkan program, mencoba alternatif sumber pendanaan, dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai kepentingan. Jadi perencanaan sosial lebih memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

Keenam, sebagai advokat dalam *community work* dicangkok dari profesi hukum. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaharuan sosial, dan pada sisi lain berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah dimana *community worker* menjalankan fungsi advokasi. Seseorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketujuh, Sebagai *activist*, seorang *community worker* mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan seringkali tujuannya

adalah mengalihkan sumberdaya ataupun kekuasaan (power) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*). Seorang aktifis biasanya memperhatikan isu-isu tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku (*injustice*), kesenjangan (*inequity*) dan perampasan hak. Seorang aktifis biasanya mencoba menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan tersebut untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada (yang menjadi penekanan mereka). Taktik yang biasa mereka lakukan adalah melalui konflik, konfrontasi (misalnya melalui demonstrasi) dan negoisasi.

Community based digunakan untuk menggali dan menumbuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat setempat dalam menemukan kebutuhan-kebutuhannya, merencanakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengembangkan sikap-sikap kooperatif dan kolaboratif antar warga masyarakat. Dari tahapan penelitian dapat diambil manfaat bahwa proses *community based* yang harus dilalui oleh seorang pekerja sosial bukanlah proses alamiah, akan tetapi merupakan proses sosial yaitu serangkaian aktifitas yang terencana untuk memfasilitasi dan mengembangkan kapasitas individu kelompok dan masyarakat guna merespon masalah-masalah yang dipandang dalam kerangka kerja dari tujuan-tujuan dan nilai-nilai spesifik.

Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pertama Pekerja sosial kadang-kadang terjebak pada kegiatan mikro kredit yang seolah-olah sebagai suatu tujuan. Pekerja sosial harus menyadari bahwa intervensi melalui mikro kredit hanyalah sebagai alat saja, sedangkan tujuan utamanya adalah kesejahteraan anak atau terpenuhinya hak anak.

Kedua, Permasalahan yang dialami keluarga anak jalanan bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi juga masalah nilai-nilai yang diterapkan keluarga terhadap anaknya. Untuk itu selain program *income generating*,

perlu diimbangi dengan program *good parenting*. Sehingga perlu adanya komitmen orang tua anak jalanan untuk melaksanakan program tersebut.

Ketiga, Pelaksanaan program sering berbenturan dengan pihak-pihak tertentu, misalnya pemerintah setempat, ada LSM yang merasa tersaingi maupun renternir yang kehilangan lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, libatkan stakeholder dan shareholder disekitar komunitas Kampung Pedongkelan.

Perbedaan penelitiannya adalah pada fokus penarikan dan pemberdayaanya. Persamaan penelitian adalah pada pengembangan model berbasis komunitas yaitu anak jalanan

